

STUDI PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SE KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nouval Arief¹, Istanto Wahyu Djatmiko²
^{1,2}Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika
Nouvalarief@gmail.com¹; istanto_wj@uny.ac.id²

Abstract

This study was aimed to find out: (1) the school and the OKU Regency's potency to the fulfillment of the national standard of graduates' competency of Vocational Secondary Schools (VSS) of the Study Program of Computer and Network Engineering, including: (a) human resources at schools, (b) education facilities at schools, (c) the society in regency of OKU, (d) the facilities in regency of OKU. (2) the fulfillment of the national standard of graduates' competency of VSS of the Study Program of Computer and Network Engineering in regency of OKU, based on: (a) affective, (b) cognitive (c) psychomotor aspects. This study was the policy research, the research's subjects consist of principals, the vice principals of curriculum affair, the vice principals of public relations affair, the vice principals of schools' facilities affair, the head of the Study Program of Computer and Network Engineering as many as 30 people of six VSSs in regency of OKU. The data were collected by questionnaires, interview and documentation. Data were analyzed by descriptive method. Based on the result, it shows that: (1) the school and the OKU Regency's potency to the fulfillment of the national standard of graduates' competency of VSS of the Study Program of Computer and Network Engineering, including: (a) the potency schools' of human resources was categorized well prepared by percentage of 66,67%, (b) the potency schools' of education facilities was categorized well prepared by percentage of 66,67%, (c) the potency societies in regency of OKU was categorized prepared by percentage of 66,67%, (d) the potency facilities in regency of OKU was categorized prepared by percentage of 66,67%. (2) the fulfillment of the national standard of graduates' competency of VSS of the Study Program of Computer and Network Engineering in regency of OKU, based on: (a) the fulfillment of the national standard of graduates' competency based on affective aspect was categorized well prepared by percentage of 50%, (b) the fulfillment of the national standard of graduates' competency based on cognitive aspect was categorized well prepared by percentage of 50%, (c) the fulfillment of the national standard of graduates' competency based on psychomotor aspect was categorized well prepared with the percentage of 50%.

Keywords: *human resources, facilities education, the society in Regency of OKU, graduates competency standard, the national standard of graduates' competency, Vocational Secondary Schools.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) potensi sekolah dan potensi Kabupaten OKU terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, sebagai berikut. (a) sumber daya manusia di sekolah, (b) fasilitas pendidikan di sekolah, (c) masyarakat di Kabupaten OKU. (d) fasilitas di Kabupaten OKU. (2) pemenuhan standar kompetensi lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU, berdasarkan aspek: (a) afektif, (b) kognitif, (c) psikomotor. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang humas, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, dari 6

SMK se Kabupaten OKU dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 orang. Data dikumpulkan dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) potensi sekolah dan Kabupaten OKU terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU, sebagai berikut. (a) potensi sumber daya manusia di sekolah termasuk kategori sangat siap dengan persentase 66,67%, (b) potensi fasilitas pendidikan termasuk kategori sangat siap dengan persentase 66,67%, (c) potensi masyarakat di Kabupaten termasuk kategori siap dengan persentase 66,67%. (d) potensi fasilitas di Kabupaten OKU termasuk kategori siap dengan persentase 66,67%. (2) pemenuhan standar kompetensi lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU, sebagai berikut. (a) pemenuhan SKL aspek afektif termasuk kategori sangat siap dengan persentase 50%, (b) pemenuhan SKL aspek kognitif termasuk kategori sangat siap dengan persentase 50%, (c) pemenuhan SKL aspek kognitif termasuk kategori sangat siap dengan persentase 50%.

Kata kunci: SDM, fasilitas pendidikan, masyarakat Kabupaten OKU, SKL, SMK.

Dewasa ini, sekolah menengah kejuruan (SMK) belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja. Ketidak siapan lulusan SMK untuk bekerja tergambar dari data jumlah angkatan kerja yang makin bertambah tiap tahunnya namun tidak diimbangi dengan penurunan angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (2013) diketahui bahwa, "Per Agustus 2013, dari 118,19 juta angkatan kerja, 7,39 juta adalah pengangguran terbuka. Padahal per Agustus 2000, dari 95,70 angkatan kerja, hanya 5,87 juta yang merupakan pengangguran terbuka[1]." Data ini teridentifikasi bahwa jumlah pengangguran di Indonesia masih sangat besar dan masalah ini dialami secara merata oleh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami masalah tentang mutu SDM lulusan SMK. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2013) diketahui bahwa, pada Februari 2013 jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan mencapai 3.904.978 orang. Jumlah tersebut bertambah sekitar 158.606 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2013 dan berkurang sebanyak 24.483 orang dibanding Februari 2012. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada Februari 2013 mencapai 5,49 persen atau sekitar 214.375 orang, menurun 0,21 persen atau sekitar 213.441 orang dibanding TPT Agustus 2012 dan menurun 0,10 persen atau sekitar 219.778 orang dibanding TPT Februari 2012 [2]. Angkat TPT di atas teridentifikasi bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera selatan hanya mengalami sedikit perbaikan selama enam bulan terakhir (Agustus 2012-Februari 2013).

Adanya *mismatch* antara Kualitas SDM dengan tuntutan pekerjaan di daerah yang menjadi penyebab timbul pengangguran tersebut. Kesenjangan kemampuan lulusan dan kebutuhan dunia kerja dikarenakan partisipasi potensi daerah yang belum maksimal. Potensi tersebut diantaranya masyarakat, fasilitas, dan sumber daya manusia (SDM). Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya bertujuan memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat (orang tua dan dunia usaha & dunia industri) berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.

Keberagaman industri menjadi masalah lain bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Sekian banyak industri yang ada di Sumatera Selatan, sebagian besar tergolong industri menengah dan industri kecil, dan hanya sebagian kecil saja yang tergolong industri besar. Industri besar dan menengah yang ada di Sumatera Selatan tidak sebanyak industri-industri yang ada di pulau Jawa. Di Sumatera Selatan industri masih ada yang enggan untuk berhubungan dengan pendidikan kejuruan bahkan siswa Praktik Kerja Industri masih mempunyai tempat yang terbatas di industri di samping jumlah industri yang tidak seimbang dengan keberagaman program yang ada di SMK.

Keterlibatan atau peran dunia usaha dan dunia industri dalam pendidikan kejuruan akan sangat penting dalam membantu mengembangkan keterampilan siswa dengan fasilitas-fasilitas yang relevan yang ada di industri. Jelasnya untuk menutupi kekurangan fasilitas yang ada di sekolah, pimpinan industri dapat membantu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di industri dengan fasilitas yang relevan di industri. Kebijakan pemerintah yang mendorong tumbuhnya jumlah SMK hingga menjadi 70% SMK dan 30 % SMA semakin menambah masalah yang terkait dengan hal ini, karena anggaran untuk penyediaan alat dan bahan praktik masih kurang, maka akan semakin banyak SMK baru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan standar kompetensi dunia kerja.

Fasilitas praktik yang ada di sekolah kejuruan saat ini sangat jauh dari harapan yang sesuai dengan tuntutan profil kelulusan siswa pendidikan kejuruan. Dengan kenyataan fasilitas yang tidak memadai, maka pemenuhan lulusan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industry akan terhambat. Oleh sebab itu, idealnya fasilitas praktik yang ada di institusi pendidikan kejuruan harus mendukung pelaksanaan kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah. Pemenuhan standar kompetensi lulusan juga tidak terlepas dari sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya manusia yang dimaksud yakni guru dan kepemimpinan kepala sekolah.

Kualifikasi akademik yang rendah menyebabkan guru kurang berkompeten dalam proses pembelajaran. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen, bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi [3]. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, menyebutkan bahwa kualifikasi akademik guru SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi [4]. Selain guru, pemenuhan standar kompetensi lulusan SMK juga ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah.

Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah yang tidak sesuai peraturan berpengaruh besar terhadap kemajuan sekolah yang dipimpin olehnya. Seorang kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja sama dalam kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah.

Badan Standar Nasional Pendidikan bekerja sama dengan Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas (2009), menetapkan bahwa kualifikasi akademik kepala sekolah minimal (S1) dan diutamakan yang berpendidikan S2 kependidikan atau non kependidikan yang relevan. Di samping memiliki kualifikasi yang telah distandarkan, kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Jika standar kualifikasi dan kompetensi tersebut di atas sudah dimiliki oleh seorang kepala sekolah, maka tujuan sekolah menghasilkan lulusan yang berkualitas bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memiliki 12 SMK yang terdiri dari SMK Negeri dan SMK Swasta yang tersebar merata di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten OKU menjadi salah satu bagian dari empat Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten OKU yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten OKU mempunyai potensi daerah yang beraneka ragam dan berlimpah. Namun, perkembangan industri di Kabupaten OKU kurang menggembirakan, baik industri besar, sedang, maupun industri kecil/rumah tangga. Sebagian besar industri yang berada di Kabupaten OKU adalah industri dengan skala menengah dan skala kecil dengan kondisi sebagian besar masih relatif lemah dan kurang efisien. Industri besar yang ada di Kabupaten OKU adalah PT. Semen Baturaja, Tbk dan industri pengolahan kelapa sawit yang di kelola oleh PT. Mitra Ogan dan PT. Minga Ogan.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten OKU dalam menangani perindustrian diarahkan pada peningkatan pertumbuhan industri dan kerajinan, produksi dan daya saing, penyerapan tenaga kerja serta menciptakan usaha yang kondusif dan peningkatan pangsa pasar.

Program-program yang dilaksanakan untuk memajukan industri di Kabupaten OKU adalah program pengembangan industri kecil, menengah dan bantuan (hibah). Melalui program pengembangan industri kecil dan menengah berusaha untuk meningkatkan keterampilan para pengusaha dan pengerajin. Sementara kebijakan pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi UKM di Kabupaten OKU diarahkan pada penumbuhan, pembinaan dan pengembangan industri perdagangan kecil dan menengah serta koperasi.

Fakta dan data diatas memberi gambaran bahwa SMK belum mampu menjadikan dirinya sebagai sekolah favorit pilihan siswa yang siap bekerja, meskipun pemerintah sudah memberikan banyak perhatian kepada sekolah kejuruan. Hal ini disebabkan oleh lulusan SMK masih sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan sebelumnya. Melanjutkan ke perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan SMK menjadi suatu fenomena yang mendukung bahwa masih belum siapnya lulusan SMK secara mental dan keterampilan untuk langsung bekerja. Kiranya perlu diadakan penelitian kebijakan agar dapat diketahui gambaran sesungguhnya secara lengkap.

Kajian Pustaka

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja kelas menengah dalam memasuki dunia kerja dengan produktif dan mengembangkan sikap profesional. Clarke & Winch (2007: 62), mengungkapkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan upaya pengembangan sosial ketenagakerjaan, pemeliharaan, percepatan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja tertentu dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat [6]. Senada dengan pengertian di atas, Gasskov (2000: 5), menyatakan bahwa amanat bagi sekolah kejuruan, terpenting bahwa sistem pendidikan dan latihan kejuruan harus memberikan bekal keterampilan khusus untuk individu yang memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan atau melalui bisnis mandiri, melatih untuk bekerja produktif dan beradaptasi dengan kondisi kemandirian teknologi [6].

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 76 ayat 2, menyatakan bahwa fungsi pendidikan menengah kejuruan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat[7]. Berdasarkan fungsi SMK tersebut, maka SMK harus berhubungan dengan pihak masyarakat yang dalam hal ini dikhususkan pada penyedia lapangan kerja yaitu dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Hal itu penting agar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada siswa memang sesuai dan dibutuhkan DU/DI, serta agar peserta didik mengetahui dan memahami pemanfaatan dan perkembangan teknologi yang digunakan DU/DI.

Peserta didik diberi pilihan dalam memilih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi (kompetensi). Pilihan-pilihan tersebut tercantum dalam Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Jarvis dalam Taqwali (2006: 5), menjabarkan bahwa elemen kompetensi profesional mencakup tiga unsur yakni, pengetahuan, keterampilan dan sikap [8]. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan [9]. Tujuan kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Siswanti (2009) , menyebutkan berbagai permasalahan terkait mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan yang dihadapi SMK perlu dicarikan alternatif, dan daya saing pendidikan yang dihadapi SMK perlu dicarikan alternatif pemecahannya agar para pemangku kepentingan yang terkait dan berwenang dapat melaksanakan perannya masing-masing. Kunci sukses dalam menghasilkan lulusan SMK yang produktif, inovatif, dan kreatif serta kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja sangat

ditentukan oleh sumber daya dalam pembelajaran [10]. Kunci sukses tersebut antara lain berkaitan dengan masyarakat, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas.

Masyarakat dalam artian sederhana adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat dengan kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Koentjaraningrat menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif (Mulyasa, 2013: 214) [11]. Partisipasi kuantitatif menunjukkan pada frekuensi keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjukkan pada tingkat dan derajatnya.

Komponen masyarakat lainnya selain orang tua adalah dunia usaha dan dunia industri. Dunia usaha atau industri adalah dunia kerja dimana lulusan SMK bekerja, baik ditinjau dari jenis industrinya yaitu bergerak dalam bidang jasa atau produk (*manufacturing*) maupun ditinjau dari klasifikasinya yaitu berskala besar/strategis, menengah, dan kecil. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Lingkungan Kementerian Perindustrian Lampiran 1 mengelompokkan industri menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok industri kimia dasar, kelompok industri mesin, logam dasar dan elektronika, kelompok aneka industri dan kelompok industri kecil [12]. Jika dikaitkan dengan pengelompokkan pada sekolah menengah kejuruan (SMK), maka SMK yang termasuk kelompok teknologi dan industri dalam pemenuhan standar kompetensi lulusan (SKL) dapat memilih kelompok industri maupun kelompok industri hilir sebagai pasangannya. Dengan demikian SMK kelompok teknologi dan industri khususnya program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), dapat memilih industri yang termasuk kelompok hulu maupun industri kelompok hilir yang relevan dengan lapangan kerja di bidang Teknik Komputer dan Jaringan.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007, disebutkan bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan [13]. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya. Indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin kerjasama ditunjukkan oleh: (1) terbentuknya tim khusus humas/atau tim kerjasama dan mampu menggalang kemitraan, terlaksanannya kunjungan peninjauan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan sebelum pelaksanaan program, (3) terealisasinya kontrak kerjasama yang dituangkan dalam MoU atau piagam-piagam kerjasama dengan pihak terkait, dan (4) terealisasinya berbagai kegiatan dalam kerangka mensukseskan pelaksanaan program, seperti (a) pertukaran pelajar, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pimpinan sekolah dalam upaya penambahan wawasan dan kompetensinya; (b) magang guru ke lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi dan sebagainya (Depdiknas, 2009 :64) [14].

Sumber daya manusia atau SDM yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan. Permendiknas No. 28 tahun 2010 Pasal 2, dikatakan bahwa syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah antara lain: memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik, dan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima (5) tahun [15]. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, menyebutkan bahwa kualifikasi akademik guru SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selanjutnya, standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Fasilitas adalah sarana dan prasarana. Sanjaya (2006: 55), memberikan pengertian Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya; sedangkan prasarana adalah segala sesuatu secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan lain sebagainya [16]. Sarana dan prasarana umum pada lembaga pendidikan yang mencakup pengadaan,

pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah sangat diperlukan dan harus dipenuhi. Sementara itu, Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana SMK/MAK, disebutkan standar sarana dan prasarana sekolah mencakup: (1) bangunan, (2) kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran umum, (3) kelengkapan sarana prasarana ruang penunjang, (4) kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran khusus. Sekolah dikatakan siap secara potensi fasilitas berarti memiliki minimal kebutuhan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah [17]. Selain itu sekolah harus mampu mendayagunakan dan memanfaatkan secara optimal.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan (*policy research*). Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu, SMK Negeri 2 Ogan Komering Ulu, SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu, SMK Trisakti Baturaja, SMK Sentosa Bhakti Baturaja, dan SMK Yadika Baturaja. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu angket (kuesioner), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa terdapat dua butir item yang gugur dari total 49 item. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan uji reliabilitas dengan rumus *Alpha Cronbach* dalam Program SPSS dengan menggunakan komputer diketahui nilai koefisien *Alpha* sebesar 0,922 atau diinterpretasikan "sangat tinggi."

Hasil dan Pembahasan

Potensi sekolah dan Kabupaten OKU terhadap pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan SMK pada Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan terbagi menjadi dua aspek, yaitu potensi sekolah yang terdiri atas SDM dan fasilitas, dan aspek potensi Kabupaten OKU yang terdiri atas masyarakat dan fasilitas. Potensi SDM di sekolah terdiri dari tiga indikator, yaitu pemenuhan jumlah guru, kualifikasi akademik, dan kesesuaian mengajar. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket dengan responden Ketua Program Keahlian TKJ. Potensi fasilitas sekolah terdiri dari empat indikator, yaitu bangunan sekolah, peralatan praktik, media pembelajaran, dan mebel (perlengkapan dan perabot). Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana.

Selanjutnya, potensi masyarakat Kabupaten OKU terdiri dari dua indikator yaitu, spesifikasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan SMK. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket dengan responden wakil kepala sekolah bidang humas. Sedangkan, potensi fasilitas di Kabupaten OKU terdiri dari dua indikator, yaitu: finansial dan nonfinansial. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket dengan responden yaitu kepala sekolah yang didukung oleh dokumen terkait. Sementara itu, pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se kabupaten OKU terdiri dari tiga aspek yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket dengan responden wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang didukung oleh dokumen terkait.

Hasil analisis distribusi kategori potensi SDM di sekolah, fasilitas di sekolah, masyarakat di Kabupaten OKU, dan fasilitas di Kabupaten OKU, terhadap pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Data Potensi Sekolah dan Kabupaten OKU

	KATEGORI				
	Sangat Siap	Siap	Kurang Siap	Belum Siap	
POTENSI	SDM di Sekolah	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%
	Fasilitas Pendidikan di Sekolah	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%
	Masyarakat Kabupaten OKU	0,00%	66,67%	0,00%	33,33%
	Fasilitas Kabupaten OKU	0,00%	66,67%	0,00%	33,33%

Tabel 1 di atas dapat dijelaskan hasil analisis data distribusi frekuensi penelitian diperoleh persentase potensi SDM di sekolah terhadap pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU sebesar 66,67% termasuk dalam kategori sangat siap. Sedangkan 33,33% termasuk dalam kategori siap.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka hasil analisis data distribusi frekuensi penelitian diperoleh persentase potensi fasilitas di sekolah terhadap pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU sebesar 66,67% termasuk dalam kategori sangat siap. Sedangkan 33,33% termasuk dalam kategori siap.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka hasil analisis data distribusi frekuensi penelitian diperoleh persentase potensi masyarakat di Kabupaten OKU terhadap pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan sebesar 66,67% termasuk dalam kategori siap. Sedangkan 33,33% termasuk dalam kategori belum siap.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka hasil analisis data distribusi frekuensi penelitian diperoleh persentase potensi fasilitas di Kabupaten OKU terhadap pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan sebesar 66,67% termasuk dalam kategori siap. Sedangkan 33,33% termasuk dalam kategori belum siap.

Selanjutnya hasil analisis distribusi kategori pemenuhan SKL aspek kognitif, afektif, dan psikomotor di SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU, disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Data Pemenuhan SKL

	KATEGORI				
	Sangat Siap	Siap	Kurang Siap	Belum Siap	
SKL	Aspek Afektif	50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
	Apek Kognitif	50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
	Aspek Psikomotor	50,00%	16,67%	16,67%	16,67%

Tabel 2 di atas dapat dijelaskan hasil analisis data distribusi frekuensi penelitian diperoleh persentase pemenuhan SKL aspek afektif SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU sebesar 50,00% termasuk dalam kategori sangat siap, sedangkan pemenuhan SKL yang lain berada pada kategori siap, kurang siap, dan belum siap dengan masing-masing persentase sebesar 16,67%.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka hasil analisis data distribusi frekuensi penelitian diperoleh persentase pemenuhan SKL aspek kognitif SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU sebesar 50,00% termasuk dalam kategori sangat siap, sedangkan pemenuhan SKL yang lain berada pada kategori siap, kurang siap, dan belum siap dengan masing-masing persentase sebesar 16,67%.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka hasil analisis data distribusi frekuensi penelitian diperoleh persentase pemenuhan SKL aspek Psikomotor SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU sebesar 50,00% termasuk dalam kategori sangat siap, sedangkan pemenuhan SKL yang lain berada pada kategori siap, kurang siap, dan belum siap dengan masing-masing persentase sebesar 16,67%.

Simpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Potensi sekolah dan daerah terhadap pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU adalah potensi sumber daya manusia di sekolah terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU termasuk kategori sangat siap dengan persentase 66,67%. Indikator yang masih perlu diperhatikan yakni kualifikasi dan latar belakang pendidikan. (2) potensi fasilitas di sekolah terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU termasuk kategori sangat siap dengan persentase 66,67%. Indikator yang masih perlu diperhatikan yakni peralatan komputer. (3) potensi masyarakat di Kabupaten OKU terhadap pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan termasuk kategori siap dengan persentase 66,67%. (4) potensi fasilitas di Kabupaten OKU terhadap pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan termasuk kategori siap dengan persentase 66,67%. Indikator yang masih perlu diperhatikan yakni dukungan finansial.

Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU sebagai berikut. (1) pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Aspek Afektif SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU termasuk kategori sangat siap dengan persentase 50%. (2) pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Aspek Kognitif SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU termasuk kategori sangat siap dengan persentase 50%. (3) pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Aspek Psikomotor SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan se Kabupaten OKU termasuk kategori sangat siap dengan persentase 50%. Indikator yang perlu diperhatikan yakni kompetensi keterampilan.

Hasil penelitian ini mengasilkan dua rekomendasi yaitu untuk: (1) Dinas Pendidikan, (2) SMK di Kabupaten OKU. Hasil penelitian potensi SDM Kabupaten OKU ditemukan bahwa terdapat tiga dari enam kepala sekolah di Kabupaten OKU yang kualifikasi pendidikannya masih sarjana (S1). Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten OKU seharusnya melakukan *re-generasi* dengan mempertimbangkan SDM yang berkualifikasi S2 bagi kepala sekolah. Caranya adalah melakukan pemberdayaan SDM sekolah yang berkualifikasi S2 untuk dijadikan kepala sekolah. Bagi sekolah yang belum memiliki SDM yang berkualifikasi S2 maka pihak Dinas Kabupaten harus memberikan kesempatan bagi kepala sekolah untuk menempuh pendidikan hingga S2. Temuan lain dari hasil penelitian tentang SDM yakni dari 54 guru terdapat tujuh orang yang kualifikasi pendidikan D3, 46 berkualifikasi S1, dan satu orang yang sudah berkualifikasi pendidikan S2. Selain temuan itu, juga ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda yakni sejumlah enam orang dari total 54 guru. Berdasarkan temuan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten OKU harus memberikan pembinaan atau pelatihan bagi para guru yang kualifikasi pendidikannya masih D3 dan bagi guru yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan mata pelajaran yang diajarkan sehingga para guru tersebut memiliki kemampuan pada bidang yang diajarkan sesuai dengan yang distandarkan.

Sementara itu, potensi fasilitas ada temuan pada indikator peralatan praktik. Yaitu pemenuhan fasilitas komputer yang banyaknya lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya siswa dalam satu rombel (± 32 siswa). Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah seharusnya memberikan bantuan dana untuk menambah peralatan praktik di sekolah. Selanjutnya, potensi masyarakat ada temuan bahwa peran serta masyarakat terhadap pendidikan masih sangat kurang, baik dari sisi finansial maupun nonfinansial. Dari sisi finansial, masyarakat (orang tua) hanya berpartisipasi dalam hal pembiayaan pendidikan siswa, dan pembiayaan pendidikan ini hanya berlaku untuk sekolah SMK Swasta. Sedangkan untuk SMK Negeri tidak ada peran serta orang tua dalam pembiayaan pendidikan, hal ini dikarenakan Kabupaten OKU sudah memberlakukan wajib belajar 12 tahun untuk sekolah negeri, termasuk SMK Negeri.

Berdasarkan temuan di atas, maka para *stakeholders* yakni sekolah ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten OKU harus lebih aktif melibatkan masyarakat dalam segala hal yang berhubungan dengan mutu pendidikan. Apabila masyarakat sudah dilibatkan secara aktif, maka mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap mutu pendidikan, khususnya kompetensi lulusan siswa. Dengan demikian, orang tua akan lebih bersemangat untuk berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik perannya dalam finansial maupun nonfinansial. Peran serta masyarakat selain orang tua yaitu dunia usaha dan dunia industri. Temuan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bidang pekerjaan DU/DI di kabupaten OKU sebagian besar *mismatch* dengan program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Rata-rata industri di Kabupaten OKU bergerak dalam bidang Pertanian & perkebunan, dan pertambangan, industri. Hal ini berakibat pada jumlah industri yang menjalin kerjasama dengan sekolah sedikit, kemudian partisipasi DU/DI terhadap pendidikan hanya sebatas penyedia tempat bagi siswa yang melaksanakan Praktik Kerja Industri. Adanya *Mismatch* antara bidang pekerjaan industri dengan kompetensi lulusan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten OKU dalam membuka jurusan di SMK harus mempertimbangkan potensi yang ada di daerah, sehingga lebih akan ada kecocokan antara potensi yang ada di daerah dengan kompetensi siswa.

Pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan termasuk kategori siap dengan persentase 50,00%, namun masih terdapat kekurangan sebesar 33,33% pada kategori siap, dan 16,67% pada kategori kurang siap. Temuan tersebut memberi gambaran bahwa kesiapan pemenuhan SKL secara *output* sudah dikatakan siap karena sudah mencapai persentase 50%. Akan tetapi kesiapan pemenuhan SKL secara *outcome* masih belum siap, karena kesiapan kerja siswa Program Keahlian TKJ *mismatch* dengan potensi bidang pekerjaan yang ada di daerah, berdasarkan data DU/DI di lingkungan Kabupaten OKU yang diperoleh, ternyata DU/DI tersebut sebagian besar bergerak dalam bidang pertanian & perkebunan, dan pertambangan. Temuan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten OKU untuk lebih selektif dalam setiap membuka jurusan baru yang ada di SMK, mengingat jurusan TKJ kurang cocok dengan potensi DU/DI yang dibutuhkan di daerah tersebut.

(2) SMK di Kabupaten OKU, temuan pertama berkaitan dengan potensi SDM sekolah dalam hal ini adalah kesiapan guru. Dari 54 guru SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan terdapat tujuh orang yang kualifikasi pendidikan D3, 46 berkualifikasi S1, dan satu orang yang sudah berkualifikasi pendidikan S2. Selain temuan itu, juga ditemukan *mismatch* antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, yakni sejumlah enam orang dari total 54 guru. Berdasarkan temuan di atas, maka sekolah dalam hal ini kepala sekolah harus memberikan dorongan kepada para guru untuk menambah kemampuan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau kelanjutan studi. Caranya adalah sekolah membuat surat rekomendasi dan merekomendasikan guru-guru yang sekiranya dianggap kurang mampu atau masih berkualifikasi D3 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Provinsi.

Di samping temuan pada potensi SDM, juga ada temuan pada potensi fasilitas mengenai indikator peralatan praktikum di laboratorium yang masih belum mencukupi. Temuan tersebut yakni komputer di laboratorium belum memenuhi kuota jumlah siswa dalam satu rombel (32 siswa) dan kekurangan komputer sebagai peralatan praktik masih bertahan sampai saat peneliti melakukan penelitian. Adanya temuan tersebut, seharusnya sekolah segera mengambil kebijakan untuk

pengadaan ataupun menambah komputer untuk kepentingan pendidikan. Sekolah dapat melibatkan peran serta Dinas Pendidikan Kabupaten, warga sekolah maupun *partner* sekolah seperti masyarakat untuk memberikan kontribusi secara finansial. Peran serta masyarakat dari sisi finansial, masyarakat (orang tua) hanya berpartisipasi dalam hal pembiayaan pendidikan siswa, dan pembiayaan pendidikan ini hanya berlaku untuk sekolah SMK Swasta. Sedangkan untuk SMK Negeri tidak ada peran serta orang tua dalam pembiayaan pendidikan, hal ini dikarenakan Kabupaten OKU sudah memberlakukan wajib belajar 12 tahun untuk sekolah negeri, termasuk SMK Negeri.

Berdasarkan temuan di atas, sekolah seharusnya lebih meningkatkan kerjasama dengan orang tua siswa dengan prinsip sukarela, saling menguntungkan dan memiliki kepentingan bersama dalam suatu wadah dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Caranya adalah lebih meningkatkan peran komite sekolah dengan mengikut sertakan orang tua dalam setiap musyawarah yang membahas kepentingan pendidikan di sekolah. Temuan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bidang pekerjaan DU/DI di kabupaten OKU sebagian besar *mismatch* dengan program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Rata-rata industri di Kabupaten OKU bergerak dalam bidang Pertanian & perkebunan, dan pertambangan, industri. Hal ini berakibat pada jumlah industri yang menjalin kerjasama dengan sekolah sedikit, kemudian partisipasi DU/DI terhadap pendidikan hanya sebatas penyedia tempat bagi siswa yang melaksanakan Praktik Kerja Industri. Adanya *Mismatch* antara bidang pekerjaan industri dengan kompetensi lulusan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, maka sekolah dalam membuka jurusan di SMK harus mempertimbangkan potensi yang ada di daerah, sehingga lebih akan ada kecocokan antara potensi yang ada di daerah dengan kompetensi siswa.

Pemenuhan SKL SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan termasuk kategori siap dengan persentase 50,00%, namun masih terdapat kekurangan sebesar 33,33% pada kategori cukup siap, dan 16,67% pada kategori kurang siap. Temuan tersebut memberi gambaran bahwa kesiapan pemenuhan SKL secara *output* sudah dikatakan siap karena sudah mencapai persentase 50%. Akan tetapi kesiapan pemenuhan SKL secara *outcome* masih belum siap, karena kesiapan kerja siswa Program Keahlian TKJ *mismatch* dengan potensi bidang pekerjaan yang ada di daerah, berdasarkan data DU/DI di lingkungan Kabupaten OKU yang diperoleh, ternyata DU/DI tersebut sebagian besar bergerak dalam bidang pertanian & perkebunan, dan pertambangan. Temuan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah untuk lebih selektif dalam setiap membuka jurusan baru yang ada di SMK, mengingat jurusan TKJ kurang cocok dengan potensi DU/DI yang dibutuhkan di daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik. (2013). *Jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, pengangguran, TPAK dan TPT, 1986-2013*. Diakses dari http://www.bps.go.id/tabsub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=5. Pada tanggal 03 Maret 2014, Jam 14.18 WIB.
- [2] Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2013). *Berita resmi statistik BPS provinsi Sumatera Selatan 2013*. <http://sumsel.bps.go.id/images/brs/2013/mei/BRS%20Naker%20Mei%202013.pdf>. Pada tanggal 5 Maret 2014, Jam 19.27 WIB.
- [3] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Kementerian Pendidikan Nasional (2007). *Peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang ujian nasional pendidikan kesetaraan tahun 2007*. Jakarta: Kemendiknas.
- [5] Clarke, L and Winch. C. (2007). *Vocational education international approach, development and system*. New York: Routledge.
- [6] Gasskov, Vladimir. (2000). *Training in organization*. Belmont United States of America: Wordworth.
- [7] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan*. Diakses melalui <http://lpp.uns.ac.id/wp-content/media/pp17.pdf>. Pada tanggal 12 Februari 2014. Jam 10.10 WIB.
- [8] Ega Taqwali. (2006). *Relevansi kompetensi lulusan LPTK-PTK dengan tuntutan dunia kerja*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional PTK di Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: UPI.
- [9] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan*. Jakarta: Permendikbud.
- [10] Siswantari. (2010). *Pendidikan kejuruan dalam penyiapan tenaga*. Diakses melalui http://infolitbangkemdignas.com/data/file/pdf/wartabalitbangrevisi_33.pdf. Pada tanggal 03 Maret 2014. Jam 13.15 WIB.
- [11] Mulyasa. (2013). *Pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- [12] Kementerian Perindustrian. (2011). *Peraturan menteri perindustrian Republik Indonesia nomor 64 tahun 2011 tentang jenis-jenis industri dalam pembinaan direktorat jenderal dan badan lingkungan kementerian perindustrian*. Jakarta: Permendin.
- [13] Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan*. Jakarta: Permendiknas.
- [14] Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Rencana strategi pendidikan nasional 2005-2009, menuju pembangunan pendidikan nasional jangka panjang 2025*. Jakarta: Depdiknas.
- [15] Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah*. Jakarta: Kemdiknas.
- [16] Wina Sanjaya. (2010). *Kurikulum dan pembelajaran: teori dan praktik pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- [17] Kementerian Pendidikan Nasional. (2008). *Peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana*. Jakarta: Kemdiknas.